

Strategi Sosialisasi Kekerasan Berbasis Gender sebagai Aksi Kolektif: Studi pada Yayasan Jaringan Relawan Independen

Amanda Naura Najla¹, Rina Hermawati²

¹Universitas Padjadjaran

Corresponding author's email : amanda22014@mail.unpad.ac.id

²Universitas Padjadjaran

r.hermawati@unpad.ac.id

Abstract

Gender-based violence (GBV) remains a persistent problem in Indonesian society, sustained by patriarchal norms that continue to marginalize survivors and normalize violence in everyday life. This study examines how the socialization strategies of Yayasan Jaringan Relawan Independen (JaRI) are formulated and implemented to build public awareness and strengthen support services for GBV survivors within a socio-cultural context that remains resistant to victim-centered approaches. Employing an ethnographic methodology, data were collected through participant observation, in-depth interviews with JaRI founders, administrators, and volunteers in Bandung City, as well as analysis of organizational documents and socialization materials. The findings reveal that JaRI implements several interconnected strategies: segmentation of socialization targets based on age groups and levels of vulnerability through the programs *Anak Aman*, *Remaja Sehat*, and *Perempuan Berdaya*; integration of socialization with psychological, medical, and legal support services; adaptation of materials and methods to local cultural and institutional contexts to reduce resistance; and the use of digital media alongside volunteer cadre development to sustain public education efforts. These strategies contribute to increasing community recognition of GBV forms that have long been normalized and to improving survivors' access to support services. However, the effectiveness of these strategies remains constrained by cultural resistance, persistent social stigma toward survivors, and limited institutional support and organizational resources. This study concludes that JaRI's socialization practices extend beyond awareness-raising, illustrating how socialization can evolve into collective action within a social movement framework to promote cultural transformation and gender justice.

Keywords: gender-based violence, socialization, social movements, advocacy, anthropology

Pendahuluan

Kekerasan berbasis gender (KBG) merupakan bentuk kekerasan yang tidak berdiri sebagai peristiwa individual semata, melainkan sebagai produk dari sistem patriarki yang secara sosial mengonstruksi peran gender, relasi gender, dan relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan

(Wulandari et al., 2024). Hamdy dan Hudri (2022) menegaskan bahwa KBG muncul dari posisi rentan perempuan yang dihasilkan oleh tatanan sosial, budaya, dan hukum yang diskriminatif, sehingga kekerasan tidak hanya terjadi di ranah privat, tetapi juga dilegitimasi dan direproduksi dalam struktur sosial yang lebih luas. Kekerasan berbasis gender mencakup kekerasan fisik,

seksual, psikologis, dan ekonomi, di mana kekerasan psikologis termanifestasi melalui ancaman, tekanan, intimidasi, serta kontrol berlebihan, sementara kekerasan ekonomi mencakup penelantaran dan eksploitasi ekonomi yang membatasi akses dan otonomi korban dalam kehidupan sehari-hari (Yulianingsih & Herawati, 2022).

Berdasarkan data terverifikasi SIMFONI-PPA, pada tahun 2023-2025 Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan jumlah kasus kekerasan tertinggi di Indonesia. Sejak 1 Januari hingga pertengahan bulan Mei 2025, jumlah kasus mencapai 1.248, dengan rincian 286 korban laki-laki dan 2.031 korban perempuan. Kota Bandung menjadi wilayah dengan angka kekerasan berbasis gender tertinggi pada periode 2020-2024. Sepanjang periode 2021-2023, jumlah kasus kekerasan seksual di Kota Bandung menunjukkan lonjakan yang tajam, sebelum kemudian mengalami tren penurunan sejak 2024. Meskipun demikian, penurunan angka ini tidak serta-merta merefleksikan berkurangnya praktik kekerasan seksual di masyarakat. Fluktuasi dan penurunan kasus kekerasan seksual perlu dibaca secara kritis, karena sejumlah kasus kekerasan seksual tidak terakomodasi dalam data resmi karena proses pelaporan masih menghadapi berbagai hambatan struktural, yaitu diantaranya rasa takut terhadap konsekuensi yang mungkin dihadapi, ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum, serta ketergantungan ekonomi pada pelaku. Kondisi ini diperkuat oleh relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan serta norma sosial yang menormalisasi kekerasan, sehingga data statistik yang tersedia lebih tepat dipahami sebagai indikasi administratif, bukan representasi utuh dari realitas kekerasan seksual yang dialami perempuan (Wura & Lobo, 2024).

Keengganan penyintas untuk melaporkan kekerasan mencerminkan bagaimana struktur budaya patriarki dan relasi kuasa yang timpang membentuk norma sosial yang menempatkan kekerasan sebagai urusan pri-

vat, sekaligus menghasilkan stigma dan tekanan sosial yang membatasi keberanian korban untuk bersuara (Pratama, 2024). Dari sudut pandang antropologi, budaya memegang peran penting dalam pembentukan dan pelanggaran kekerasan berbasis gender. Budaya patriarki, yang menjadi sistem sosial dominan di masyarakat, menempatkan laki-laki dalam posisi superior dan perempuan sebagai kelompok yang dimarginalisasi, disubordinasi, dan dipandang lebih rendah secara sosial maupun kultural melalui praktik kehidupan sehari-hari yang patriarkis (Rosramadhana et al., 2020).

Ketidaksetaraan relasi kuasa dalam masyarakat patriarkis memengaruhi angka kekerasan berbasis gender melalui dua jalur utama. Pertama, legitimasi sosial terhadap otoritas laki-laki meningkatkan risiko terjadinya kekerasan, karena kekerasan digunakan sebagai instrumen untuk mempertahankan kontrol ketika perempuan dianggap melanggar peran gender normatif, sehingga kekerasan dalam relasi intim menjadi pola yang berulang dan terstruktur. Kedua, norma patriarkis yang memandang kekerasan sebagai urusan domestik dan menganggap kontrol laki-laki sebagai hal yang wajar turut menurunkan pelaporan kasus, karena banyak perempuan tidak mengidentifikasi pengalamannya sebagai kekerasan atau enggan melapor akibat stigma dan ketergantungan ekonomi. Akibatnya, angka resmi kekerasan berbasis gender cenderung merepresentasikan kapasitas pelaporan administratif, bukan keseluruhan realitas kekerasan yang dialami perempuan (Fulu, 2015).

Berbagai studi menunjukkan bahwa pencegahan kekerasan berbasis gender dapat dilakukan melalui beragam pendekatan yang berorientasi pada peningkatan pengetahuan dan kesadaran publik. Edukasi hukum, misalnya, terbukti mampu meningkatkan pemahaman pegiat advokasi terhadap konsep keadilan gender, hak-hak korban, serta kerangka hukum pencegahan kekerasan (Rahmi et al., 2024). Selain itu, pelatihan berba-

sis komunitas yang menysasar perempuan di tingkat desa, seperti program pelatihan komunitas perempuan di Banyuwangi, terbukti memperkuat kapasitas perempuan sebagai aktor pencegahan kekerasan melalui peningkatan kesadaran, keterampilan pendampingan dasar, dan solidaritas lokal (Munandar, 2025). Pendekatan serupa juga terlihat dalam program “Sekolah Perempuan” yang dikembangkan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), yang menempatkan edukasi partisipatif sebagai sarana pemberdayaan perempuan komunitas adat untuk memahami hak-haknya, menegosiasikan relasi gender yang timpang, serta membangun mekanisme pencegahan kekerasan berbasis komunitas. Program-program tersebut menunjukkan bahwa edukasi yang dilakukan secara kolektif dan kontekstual berkontribusi pada peningkatan kesadaran kritis serta mendorong perubahan norma sosial yang selama ini menormalisasi kekerasan berbasis gender (Halla & Mare 2025; Lubis et al. 2023).

Meskipun pendekatan-pendekatan tersebut beragam, seluruhnya menempatkan sosialisasi sebagai elemen kunci dalam proses pencegahan kekerasan berbasis gender. Sosialisasi memungkinkan terjadinya penyebaran pengetahuan secara berkelanjutan, pembentukan pemahaman mengenai seksualitas dan relasi kuasa, serta pembangunan budaya penolakan terhadap kekerasan seksual di tingkat masyarakat. Melalui sosialisasi, kesadaran mengenai risiko dan dampak kekerasan dapat diperkuat sehingga masyarakat mampu mengenali ancaman, meresponsnya secara tepat, dan meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga pendamping korban. Kesadaran dan kepercayaan tersebut menjadi prasyarat penting bagi meningkatnya pelaporan kasus kekerasan yang selama ini kerap tersembunyi.

Dalam konteks ini, sosialisasi tidak berhenti pada perubahan pengetahuan individual, tetapi berfungsi sebagai sarana pembentukan kesadaran kolektif di tingkat komunitas. Oleh karena itu, diperlukan penggerak

penggerak sosial yang mampu melaksanakan sosialisasi secara masif, berkelanjutan, dan kontekstual. Melucci (1996, dalam Astuti, 2023) menjelaskan gerakan sosial sebagai aksi kolektif berbasis inisiatif masyarakat untuk menantang nilai, norma, dan praktik sosial yang tidak adil, memiliki peran strategis dalam mendorong resistensi terhadap dominasi budaya patriarki sebagai salah satu akar kekerasan berbasis gender. Berbeda dengan intervensi pemerintah yang bersifat top-down, gerakan sosial bekerja secara horizontal melalui partisipasi warga dan solidaritas komunitas, sehingga melalui kerja-kerja edukatif dan advokatif dapat berfungsi sebagai agen perubahan yang membuka ruang bagi nilai-nilai kesetaraan di masyarakat (Conti et al., 2025).

Sosialisasi ini pun tidak berhenti pada perubahan pengetahuan individual, tetapi berfungsi sebagai sarana pembentukan kesadaran kolektif di tingkat komunitas. Tujuan dari berbagai gerakan anti kekerasan berbasis gender adalah membangun budaya anti-KBG sebagai proses sosial yang menekankan pencegahan melalui perubahan nilai, norma, dan praktik sosial masyarakat. Budaya anti-KBG dibangun melalui sosialisasi berkelanjutan yang bertujuan meningkatkan kesadaran kolektif, menantang normalisasi kekerasan, serta membentuk pemahaman bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan persoalan sosial yang harus dicegah secara bersama-sama (Bintari & Djustiana, 2015). Salah satu dari gerakan ini adalah Yayasan Jaringan Relawan Independen (JaRI) yang berfokus pada upaya penanganan KBG berbasis komunitas melalui strategi-strategi sosialisasinya.

Gerakan sosial sebagai aksi kolektif memiliki peran penting dalam menyebarluaskan isu kekerasan berbasis gender melalui berbagai strategi, seperti kampanye publik, pelatihan berbasis komunitas, dan penggunaan media digital untuk membangun kesadaran kritis masyarakat. Upaya ini memerlukan sinergi dengan pemerintah dan sistem

hukum untuk menjamin terpenuhinya hak-hak korban secara menyeluruh (Akbar et al., 2021). Di dalam perspektif antropologi politik, studi mengenai gerakan sosial tidak hanya berfokus pada dinamika politik formal, tetapi juga pada hubungan kekuasaan dan resistensi yang tumbuh dari sosial budaya masyarakat. Berdasarkan sudut pandang tersebut, gerakan sosial terhadap kekerasan berbasis gender dapat dipahami sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi patriarki yang tertanam secara kultural.

Yayasan Jaringan Relawan Independen (JaRI) menjadi salah satu lembaga nirlaba yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat serta pendampingan bagi korban kekerasan berbasis gender. Dengan pendekatan komunitas, JaRI mengupayakan strategi-strategi sosialisasi berbasis gerakan sosial yang pada prinsipnya bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat dan memberikan pertolongan bagi penyintas KBG, baik itu perempuan maupun laki-laki. Meski demikian, JaRI masih menghadapi hambatan serta tantangan berupa resistensi budaya, stigma sosial, dan juga hambatan internal lainnya. Hal inilah yang kemudian JaRI perjuangkan dalam perjalanannya.

JaRI bukanlah satu-satunya gerakan berbasis komunitas seputar KBG. Ada pula Institut KAPAL Perempuan yang memperlihatkan bagaimana gerakan sosial memanfaatkan sosialisasi yang sistematis melalui pendekatan pendidikan kritis feminis untuk menyasar aktivis perempuan dan pemimpin perempuan marginal. Kemudian, Yayasan PULIH melalui program *Men Care* menunjukkan bagaimana sosialisasi berbasis komunitas dapat digunakan sebagai strategi pencegahan kekerasan berbasis gender dengan melibatkan laki-laki sebagai agen perubahan. Program ini menekankan pendidikan komunitas, kampanye publik, dan dialog partisipatif untuk menantang norma patriarki, membangun pemahaman tentang relasi gender yang setara, serta mendorong perubahan perilaku kolektif dalam mencegah

kekerasan terhadap perempuan (Clara & Nugroho, 2016).

Sejumlah penelitian telah menyoroti strategi sosialisasi kekerasan berbasis gender, sebagian besar penelitian masih berfokus pada bagaimana sosialisasi dilakukan, terutama dalam bentuk kampanye publik, pendidikan komunitas, dan pemanfaatan media sebagai sarana penyebaran pesan anti-kekerasan (Akbar et al., 2021; Atikah et al., 2024; Wijayanti, 2019). Kajian lain juga menitikberatkan pada efektivitas program sosialisasi dalam meningkatkan pengetahuan, kesadaran, atau sikap masyarakat terhadap isu gender dan kekerasan (Munandar, 2025; Lubis et al., 2023). Selain itu, sejumlah penelitian memusatkan perhatian pada aspek advokasi dan kebijakan, dengan menyoroti peran gerakan sosial dalam mendorong perubahan regulasi atau dukungan institusional bagi korban kekerasan berbasis gender. Tetapi demikian, relatif sedikit penelitian yang secara mendalam membahas tantangan yang dihadapi oleh gerakan berbasis komunitas dalam menjalankan strategi sosialisasi tersebut, khususnya hambatan kultural seperti resistensi nilai patriarkis, stigma terhadap korban, relasi kuasa lokal, serta keterbatasan organisasional yang memengaruhi keberlanjutan gerakan. Padahal, tantangan-tantangan ini memiliki implikasi langsung terhadap efektivitas sosialisasi dan daya jangkauan gerakan sosial di tingkat akar rumput.

Kondisi ini menunjukkan adanya celah penelitian, khususnya dalam mengkaji strategi Yayasan Jaringan Relawan Independen (JaRI) di Kota Bandung. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan sebagai berikut: (1) Bagaimana strategi JaRI dalam melakukan sosialisasi kekerasan berbasis gender melalui pendekatan berbasis komunitas? (2) Apa hambatan kultural, struktural, dan organisasi apa saja yang dihadapi JaRI dalam menjalankan strategi sosialisasi tersebut?

Kajian Pustaka

Dalam perspektif antropologi, kekerasan berbasis gender dipahami sebagai hasil konstruksi sosial identitas gender yang membentuk dan melanggengkan struktur kekuasaan patriarkal (Mulla, 2025). Pada dasarnya, pemahaman mengenai gender dan seks perlu ditegaskan, di mana gender dipahami sebagai hasil konstruksi sosial, sedangkan seks berkaitan dengan aspek biologis (Zhafarina & Andity, 2022). Kekerasan berbasis gender muncul ketika konstruksi sosial tersebut menghasilkan ketimpangan posisi dan peran antara laki-laki dan perempuan, yang kemudian memunculkan praktik kekerasan yang dilegitimasi secara sosial. Dalam perspektif ini, KBG tidak dipahami sebagai tindakan individual semata, melainkan sebagai fenomena sosial yang dibentuk dan direproduksi melalui interaksi sosial serta institusi-institusi masyarakat (Berger & Luckmann 1966, dalam Astuti, 2023).

Relasi kuasa menjadi elemen kunci dalam memahami terjadinya kekerasan berbasis gender. Ketidaksetaraan gender dipandang sebagai bentuk dominasi dan subordinasi yang terstruktur, di mana satu kelompok memiliki kuasa untuk mengontrol, mendefinisikan, dan membatasi kelompok lainnya. Foucault (1980) menjelaskan bahwa kekuasaan dan pengetahuan saling terkait dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap realitas sosial. Dalam konteks ini, patriarki dapat dipahami sebagai bentuk pengetahuan yang dilegitimasi melalui relasi kuasa tersebut dan diterima sebagai kebenaran sosial. Kekerasan berbasis gender kemudian menjadi praktik yang dinormalisasi dan direproduksi melalui legitimasi pengetahuan patriarkis, baik dalam ranah domestik maupun publik. Sementara itu, Collins (2019) melalui pendekatan feminisme interseksional dengan konsep *matrix of domination* menunjukkan adanya keterkaitan antara berbagai bentuk penindasan yang saling memperkuat dan memperdalam kerentanan korban. Kedua pandangan tersebut

saling melengkapi dalam menjelaskan bagaimana relasi kuasa dan ketidaksetaraan gender dipelihara secara sistematis hingga menjadi dasar terjadinya kekerasan berbasis gender. Studi-studi terdahulu menunjukkan bahwa budaya patriarki di Indonesia memperkuat praktik kekerasan berbasis gender dengan menempatkan laki-laki sebagai pihak dominan dan membenarkan kekerasan terhadap perempuan. Patriarki beroperasi sebagai sistem sosial yang mereproduksi ketimpangan gender dan memengaruhi praktik kekerasan berbasis gender (Hamdy & Hudri, 2022; Eleanor & Supriyanto, 2020; Nurfadillah, 2025). Kekerasan berbasis gender terlahir sebagai produk patriarki yang mengonstruksi peran, relasi, dan kuasa gender dalam struktur sosial dan hukum di Indonesia. Sementara itu, analisis budaya patriarki sebagai sistem sosial yang menempatkan laki-laki pada posisi dominan juga diperkuat oleh penelitian dengan menyoroti mekanisme patriarki dalam norma, praktik, dan institusi sosial yang menormalisasi ketidaksetaraan gender di Indonesia. Selain itu, studi oleh Tilly dan Wood (2015) serta Somma (2023) menunjukkan tentang hubungan antara budaya patriarki dan kekerasan terhadap perempuan menunjukkan bahwa dominasi patriarkal terhadap posisi perempuan di ranah domestik dan publik berkorelasi dengan tingginya insiden kekerasan dan rendahnya pelaporan kasus oleh korban.

Dalam upaya menghadapi kekerasan berbasis gender, gerakan sosial berperan sebagai ruang aksi kolektif yang menghubungkan kesadaran individu dengan perubahan sosial yang lebih luas. Gerakan sosial lahir sebagai bentuk aksi kolektif yang terorganisir untuk menuntut perubahan sosial dan politik yang berperan besar sebagai penggerak utama yang menghubungkan solidaritas masyarakat dengan upaya perlindungan korban (Tilly & Wood, 2015; Somma, 2023). Sukmana (2016) membedakan antara gerakan sosial lama yang berfokus pada perubahan struktural melalui kebijakan dan hukum, dengan gerakan sosial baru yang le-

bih menekankan transformasi kultural, produksi wacana, dan pembentukan kesadaran publik melalui jaringan yang cair dan partisipatif. Dalam kerangka teori gerakan sosial baru, Melucci (1996, dalam Astuti, 2023) menekankan bahwa gerakan sosial kontemporer tidak hanya berorientasi pada perebutan sumber daya material, tetapi juga pada pembangunan makna, identitas kolektif, dan relasi sosial baru. Perspektif ini relevan dalam memahami gerakan anti-KBG yang bekerja melalui sosialisasi, advokasi, dan pendampingan sebagai upaya mengubah cara pandang masyarakat terhadap kekerasan berbasis gender. Sebagaimana ditegaskan oleh Lubis et al. (2013), upaya pendampingan dan advokasi tidak hanya berperan dalam memberikan perlindungan kepada korban, tetapi juga menjadi sarana penting dalam membangun kesadaran kritis publik mengenai ketimpangan relasi kuasa gender yang melanggengkan kekerasan. Dengan demikian, gerakan anti-KBG dapat dipahami sebagai praktik gerakan sosial yang berorientasi pada perubahan kultural jangka panjang melalui internalisasi nilai-nilai keadilan gender di tingkat komunitas.

Dalam konteks penanganan KBG, sosialisasi menjadi salah satu strategi penting untuk meningkatkan kesadaran publik. Dalam konteks ini, sosialisasi dipahami sebagai proses penyebaran nilai, pengetahuan, dan norma sosial secara sistematis kepada masyarakat dengan tujuan membentuk pemahaman kolektif serta sikap penolakan terhadap kekerasan berbasis gender. Sosialisasi tidak hanya berfungsi sebagai transfer informasi, tetapi juga sebagai mekanisme pembentukan makna sosial mengenai relasi gender yang setara dan non-kekerasan (Noko et al., 2025).

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa efektivitas sosialisasi sangat dipengaruhi oleh konteks budaya dan media yang digunakan. Halla dan Mare (2025) menunjukkan bahwa sosialisasi gender menjadi lebih efektif ketika pesan anti-kekerasan disampaikan dengan mengaitkannya pada nilai-

nilai budaya dan ajaran agama lokal, misalnya melalui penggunaan narasi keagamaan tentang keadilan dan kasih sayang, pelibatan tokoh adat dan tokoh agama sebagai komunikator, serta penyampaian pesan dalam forum komunitas yang telah akrab bagi masyarakat. Yuliangsih dan Aini (2023) menyoroti penggunaan media tradisional sebagai sarana efektif penyebaran pesan anti-KBG. Pendekatan multimedia yang menggabungkan media tradisional dan digital juga semakin mendapat perhatian, sebagaimana dikemukakan oleh Hidayat et al. (2025) yang menegaskan pentingnya integrasi berbagai media untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat secara efektif. Ketika teknologi dan media semakin berkembang, ide-ide kampanye digital dengan pendekatan *message appeals* menjadi semakin populer, sebagaimana diuraikan oleh Ratnasari et al. (2020) dan Perangin-Angin dan Firoz (2024) yang menekankan pentingnya konten persuasif dan emosional dalam meningkatkan kesadaran publik. Sari et al., (2021) menambahkan bahwa media sosial interaktif mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam diskursus KBG, memperkuat efektivitas kampanye digital. Selain itu, literasi digital menjadi aspek krusial dalam pencegahan KBG, sebagaimana diuraikan oleh Saragih et al. (2025), yang menegaskan bahwa kemampuan masyarakat dalam mengakses dan memahami informasi digital dapat memperkuat upaya pencegahan kekerasan berbasis gender.

Sosialisasi merupakan langkah awal yang penting dalam penanganan kekerasan berbasis gender (KBG), tetapi sosialisasi saja tidak cukup tanpa diiringi dengan mekanisme perlindungan dan respons yang memadai bagi korban. Oleh karena itu, diperlukan strategi lanjutan yang tidak hanya meningkatkan kesadaran publik, tetapi juga memastikan tersedianya dukungan, pelaporan, dan pemulihan bagi korban KBG. Advokasi dalam konteks kekerasan berbasis gender dipahami sebagai upaya sistematis untuk memperjuangkan hak-hak korban, mendorong perubahan kebijakan, serta memba-

ngun mekanisme perlindungan dan respons yang adil dan berkelanjutan (Ananda & Tohari, 2023). Selain advokasi, pendampingan psikososial melalui layanan konsultasi dan konseling juga menjadi komponen krusial dalam penanganan KBG. Prasetyo dan Wulandari (2023) menyoroti peran pendampingan psikososial dalam memperkuat pemulihan korban KBG, mengingat kekerasan tidak hanya berdampak secara fisik, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis yang menghambat keberanian korban untuk melapor dan pulih. Dalam konteks ini, kombinasi advokasi dan konseling dapat meningkatkan efektivitas sosialisasi dengan memberikan dukungan langsung kepada korban dan masyarakat (Triantono et al., 2024). Lubis et al. (2023) menambahkan bahwa membangun budaya menolak kekerasan seksual merupakan langkah strategis yang harus diintegrasikan dalam advokasi. Selaras dengan itu, Nadhifah dan Kusumawati (2024) menegaskan bahwa sosialisasi yang berfokus pada peningkatan kesadaran dan pelaporan kekerasan dapat memperkuat mekanisme perlindungan dan respons terhadap KBG yang dinilai efektif dalam membangun mekanisme perlindungan ini adalah advokasi berbasis komunitas, karena melibatkan jejaring sosial lokal sebagai sistem pendukung korban. Pratiwi dan Arrawindha (2021) turut menegaskan bahwa advokasi berbasis komunitas dapat meningkatkan legitimasi dan keberlanjutan program pencegahan KBG, yang relevan dengan fokus penelitian ini pada gerakan sosial akar rumput.

Dalam kaitannya dengan Yayasan JaRI yang diidentifikasi sebagai gerakan sosial, sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa gerakan sosial memainkan peran penting dalam upaya penanganan kekerasan berbasis gender melalui kombinasi strategi sosialisasi dan advokasi. Merujuk pada definisi oleh Tilly dan Wood (2015) dan Melucci (1996, dalam Astuti, 2023), gerakan sosial dapat dipahami sebagai bentuk aksi kolektif yang dibangun atas solidaritas dan identitas bersama, dijalankan secara berke-

lanjutan melalui berbagai repertoar tindakan, serta ditujukan untuk menantang relasi kuasa dan norma dominan, baik melalui transformasi kultural maupun klaim politik terhadap struktur kekuasaan. Sosialisasi berfungsi sebagai sarana pembentukan kesadaran kritis masyarakat, sementara advokasi menjadi mekanisme untuk memperjuangkan perubahan struktural serta memperkuat perlindungan terhadap korban. Studi mengenai Institut KAPAL Perempuan memperlihatkan bagaimana gerakan sosial perempuan memanfaatkan sosialisasi secara sistematis sebagai bagian dari strategi advokasi yang lebih luas. Melalui pendekatan pendidikan kritis feminis dengan program seperti pameran, bazar, pertunjukan seni, dan *talk show*, KAPAL Perempuan menysar berbagai kelompok, khususnya aktivis gerakan perempuan dan pemimpin perempuan dari kelompok marginal, dengan kegiatan pelatihan, dialog, dan pendidikan publik yang berfokus pada keadilan gender, pluralisme, serta penghapusan kekerasan berbasis gender. Strategi ini menunjukkan bahwa sosialisasi tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, tetapi juga untuk membangun kapasitas kolektif dan basis sosial bagi advokasi isu kekerasan berbasis gender (Wijayanti, 2019).

Berdasarkan temuan penelitian terdahulu, kajian tentang sosialisasi KBG umumnya berfokus pada pendekatan advokasi dan penggunaan media, sementara peran organisasi akar rumput dalam menghadapi hambatan kultural belum banyak mendapat perhatian. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji strategi Yayasan Jaringan Relawan Independen (JaRI) sebagai gerakan sosial berbasis komunitas di Kota Bandung yang mengombinasikan sosialisasi, pendampingan, dan advokasi.

Metode

Pendekatan etnografi dalam penelitian ini merujuk pada tradisi antropologi yang menempatkan pengalaman dan sudut pandang aktor sosial sebagai pusat analisis. Menga-

cu pada Spradley (1979), etnografi dipahami sebagai upaya sistematis untuk menggambarkan dan menafsirkan makna-makna budaya sebagaimana dipahami oleh para pelaku di dalam konteks sosial mereka. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami strategi sosialisasi kekerasan berbasis gender tidak hanya sebagai rangkaian program formal, tetapi sebagai praktik sosial yang dijalankan, dimaknai, dan dinegosiasikan dalam interaksi sehari-hari antara pengurus, relawan, dan masyarakat sasaran. Etnografi tidak hanya dipahami sebagai teknik pengumpulan data, tetapi sebagai pendekatan penelitian yang berupaya memahami realitas sosial dari sudut pandang aktor yang terlibat di dalamnya. Dalam pengertian ini, etnografi memungkinkan peneliti untuk terlibat secara langsung dengan subjek penelitian guna mengamati bagaimana praktik sosial dijalankan, dinegosiasikan, dan dimaknai dalam kehidupan sehari-hari (Krüger, 2008).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui sejumlah wawancara dengan berbagai informan, observasi partisipatif, dan studi dokumen. Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur terhadap enam informan kunci yang terdiri atas pendiri, pengurus, dan relawan JaRI yang aktif melaksanakan kegiatan sosialisasi. Periode pengumpulan data berlangsung pada bulan Maret–Juni 2025 di Sekretariat JaRI, Kota Bandung, untuk menggali peran informan dalam sosialisasi KBG, pandangan mereka mengenai strategi yang digunakan, serta kendala dan solusi yang dihadapi. Observasi partisipatif dilakukan selama kegiatan sosialisasi, baik dalam bentuk sosialisasi publik maupun interaksi interpersonal. Dalam proses ini, peneliti turut terlibat dalam kegiatan pelatihan dan sosialisasi untuk memahami secara langsung dinamika serta strategi sosialisasi yang diterapkan. Kemudian studi dokumen dilakukan dengan menganalisis berbagai arsip laporan kegiatan sosialisasi, arsip laporan kasus kekerasan yang ditangani oleh Yayasan JaRI, dan hasil penelitian internal

lembaga.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara tematik dengan tahapan reduksi data, kategorisasi, dan penarikan kesimpulan untuk menemukan pola strategi, tantangan, serta bentuk respons yang dilakukan JaRI. Aspek etika penelitian diperhatikan dengan menjaga kerahasiaan identitas informan, memperoleh persetujuan partisipasi, dan memastikan sensitivitas dalam membahas pengalaman penyintas.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan penelitian mengenai strategi dan hambatan yang dihadapi oleh JaRI, hasil penelitian ini menjawab dua pertanyaan utama, yakni bagaimana strategi JaRI dalam melakukan sosialisasi kekerasan berbasis gender melalui pendekatan berbasis komunitas, serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa strategi dan hambatan tersebut tidak dapat dipahami secara terpisah, karena keduanya saling membentuk dan dipengaruhi oleh posisi JaRI sebagai gerakan sosial baru yang berorientasi pada transformasi kultural di tingkat komunitas.

Sebagai gerakan sosial baru, JaRI memaknai sosialisasi bukan semata sebagai aktivitas penyampaian informasi, melainkan sebagai proses jangka panjang untuk membangun kesadaran kolektif, menegosiasikan nilai-nilai lokal, serta mengubah cara pandang masyarakat terhadap relasi gender dan kekerasan berbasis gender. Orientasi ini mendorong JaRI mengembangkan strategi sosialisasi yang fleksibel, partisipatif, dan kontekstual, dengan menempatkan komunitas sebagai aktor utama perubahan. Strategi tersebut diwujudkan melalui pendekatan yang sesuai dengan target pesertanya, sehingga penyampaian sosialisasi diupayakan dapat diterima berdasarkan latar belakang target pesertanya. Pada saat yang sama, orientasi transformasi kultural tersebut juga membentuk jenis hambatan yang dihadapi JaRI. Upaya mengubah makna dan norma

sosial membuat JaRI kerap berhadapan dengan hambatan kultural berupa kuatnya nilai patriarki, stigma terhadap korban, serta anggapan bahwa isu kekerasan berbasis gender merupakan hal yang tabu. Selain itu, JaRI juga menghadapi hambatan struktural yang berkaitan dengan terbatasnya dukungan institusional dan ruang formal bagi isu kekerasan berbasis gender, serta hambatan organisasi yang muncul dari keterbatasan sumber daya dan dinamika kerja berbasis relawan. Dengan demikian, strategi sosialisasi dan hambatan yang dihadapi JaRI merupakan dua aspek yang saling terkait dan tidak terpisahkan dalam praktik gerakan sehari-hari.

Della dan Diani (2020) menjelaskan gerakan sosial baru dibedakan dari gerakan sosial konvensional karena tidak semata berorientasi pada tuntutan kebijakan atau perubahan struktural negara, melainkan menekankan transformasi kultural, pembentukan identitas kolektif, serta perubahan makna dalam kehidupan sehari-hari. Berbeda dari gerakan sosial konvensional yang berorientasi pada tuntutan kebijakan formal, JaRI menitikberatkan kerja-kerjanya pada transformasi kultural melalui sosialisasi berbasis komunitas, pendampingan penyintas, dan pembentukan kesadaran kolektif.

JaRI lahir dan bergerak dalam situasi sosial yang ditandai oleh kuatnya norma patriarki, stigma terhadap korban, serta minimnya pemahaman masyarakat mengenai kekerasan berbasis gender. Kondisi tersebut mendorong JaRI mengembangkan strategi gerakan yang fleksibel, partisipatif, dan kontekstual, yang berfokus pada perubahan cara pandang masyarakat terhadap relasi gender dan kekerasan, alih-alih semata-mata mendorong intervensi kebijakan formal.

Kekerasan Berbasis Gender dan Respons JaRI: Perempuan Masih Dianggap Kelas Dua

Yayasan JaRI menempatkan perempuan dan anak sebagai sasaran utama pendam-

pingan dan sosialisasi, meskipun tetap membuka akses layanan bagi laki-laki maupun gender lain. Penanganan yang dilakukan meliputi tiga pilar pelayanan, yaitu psikologis, medis, dan hukum, yang dipahami sebagai aspek pertolongan utama bagi korban kekerasan berbasis gender.

JaRI mengkategorikan kekerasan ke dalam beberapa jenis, dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai kasus dengan angka pelaporan tertinggi. KDRT dipahami mencakup kekerasan terhadap seluruh anggota keluarga, tidak terbatas pada relasi suami-istri, dan dikategorikan sebagai bentuk kekerasan sistematis yang merefleksikan ketimpangan relasi kuasa dalam unit sosial terkecil. Pendekatan JaRI menekankan bahwa kekerasan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup kekerasan psikis, ekonomi, dan sosial. Kasus tertinggi kedua adalah Kekerasan Terhadap Anak (KTA), yang dialami anak perempuan dan laki-laki di bawah usia 17 tahun, dengan pelaku yang didominasi oleh laki-laki berusia di atas 30 tahun. Selanjutnya, JaRI juga menangani Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) dan Kekerasan Dalam Pacaran (KDP), yang menunjukkan pola serupa, yakni perempuan lebih sering berada pada posisi korban.

Berdasarkan data kasus yang ditangani JaRI, terlihat dominasi korban perempuan yang konsisten mencapai 80-90% dari total kasus setiap tahunnya. Berikut merupakan data korban kasus yang ditangani Yayasan JaRI berdasarkan pengklasifikasian jenis kelamin.

Tahun	Perempuan	Laki-laki
2020	74	6
2021	152	13
2022	123	34
2023	106	5
2024	68	15
2025	46	8

Tabel 1. Data Kasus Yayasan JaRI Berdasarkan Jenis Kelamin, 2020-2025. (Sumber: Arsip Laporan Kasus Yayasan JaRI, 2020- Juni 2025)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender berakar pada pola pikir kolektif yang mengklasifikasikan gender layaknya strata sosial sehingga perempuan sering kali menempati posisi subordinat. Hal ini terlihat dari temuan pada sejumlah penyintas yang tidak langsung memaknai pengalaman kekerasan yang dialaminya sebagai bentuk kekerasan berbasis gender, karena tindakan kontrol terhadap keputusan personal, pembatasan ruang gerak dan aktivitas sehari-hari, maupun kekerasan verbal telah dipersepsikan sebagai hal yang wajar dalam relasi sehari-hari. Dalam beberapa kasus, korban justru menganggap pembatasan tersebut merupakan konsekuensi dari peran perempuan dalam relasi keluarga atau relasi intim. Gambaran ini tercermin dalam anggapan bahwa perempuan dapat dikontrol dan diatur hak-haknya, sampai pada kondisi yang membenarkan kekerasan terhadap mereka (Ghina, 2022). Seorang pengurus JaRI menyatakan, “Saya melihat bahwa perempuan masih sering dianggap sebagai *second class*. Oleh sebab itu, banyak orang merasa berhak untuk mengontrol, mengatur, bahkan melakukan kekerasan terhadap perempuan, karena mereka dianggap tidak berdaya.” Temuan ini selaras dengan penelitian Sitanggang et al. (2024) yang menegaskan bagaimana nilai-nilai patriarki menormalisasi ketimpangan gender dalam praktik sehari-hari.

Tamparan Tak Selalu Terlihat

Istilah “tamparan” digunakan sebagai metafora untuk menggambarkan kekerasan berbasis gender yang tidak selalu muncul dalam bentuk fisik yang kasat mata. Dalam penelitian ini, kekerasan dipahami secara luas, mencakup kekerasan psikis, ekonomi, dan sosial yang berlangsung perlahan, terinternalisasi dalam relasi sehari-hari, serta kerap dinormalisasi sehingga sulit dikenali dan dilaporkan. Komnas Perempuan mengklasifikasikan kekerasan berbasis gender ke dalam bentuk fisik, seksual, psikis, dan ekonomi yang berakar pada relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban. Sejalan

dengan klasifikasi tersebut, Yayasan Jaringan Relawan Independen (JaRI) memandang kekerasan sebagai spektrum pengalaman yang mencakup kontrol atas keputusan personal, pembatasan ruang gerak, tekanan psikologis, dan ketergantungan ekonomi yang merampas otonomi korban. Dalam beberapa kasus yang ditangani oleh JaRI, perempuan mengalami tekanan mental yang berat karena terus-menerus dihina, direndahkan, atau dikontrol secara berlebihan. Menurut Meagher et al., (2023), feminisme dipahami sebagai suatu pendekatan yang berangkat dari asumsi bahwa perempuan secara sistematis mengalami penindasan dan eksploitasi, sekaligus sebagai upaya untuk mengakhiri kondisi tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, analisis JaRI menunjukkan bahwa ungkapan-ungkapan seperti “kamu tidak berguna”, “perempuan tidak perlu sekolah tinggi”, serta larangan untuk keluar rumah dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar dikategorikan sebagai kekerasan psikologis yang berpotensi menimbulkan trauma jangka panjang. Kekerasan ekonomi juga menjadi jenis kekerasan yang kerap kali tidak disadari, seperti pembatasan hak-hak bekerja untuk perempuan, diskriminasi upah untuk karyawan perempuan, juga pembatasan pengelolaan dana keluarga oleh suami kepada istri. Temuan ini diperkuat oleh perspektif Uswatina et al. (2021) yang menegaskan bahwa kekerasan berbasis gender memiliki spektrum yang luas dan sering kali terjadi secara bersamaan dalam berbagai bentuk yang saling berkaitan. Ernawati et al., (2020) juga turut menuturkan bahwasanya kekerasan verbal yang dilakukan secara terus menerus dapat berlangsung tanpa disadari karena terbalut dalam interaksi sehari-hari yang tampak biasa, tetapi sebenarnya merupakan bentuk kekerasan psikologis yang berdampak pada korban.

Banyak fenomena kekerasan yang justru dinormalisasi dan dibungkus dalam relasi yang dianggap sebagai ‘hal biasa’ dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, seorang istri yang dilarang bekerja oleh suami-

nya, diminta untuk selalu meminta izin dalam mengambil keputusan pribadi, atau dibatasi ruang geraknya untuk tidak bertemu teman atau keluarga sering kali tidak dianggap sebagai bentuk kekerasan. Dalam banyak pandangan yang mendominasi masyarakat, kondisi tersebut justru dilihat sebagai tanda bahwa suami 'peduli' atau 'melindungi'. Meskipun demikian, penelitian ini juga mencatat bahwa tidak seluruh bentuk penolakan, tabu, atau keengganan membiarkan kekerasan berbasis gender dapat secara langsung dikategorikan sebagai ekspresi patriarki. Beberapa bentuk resistensi lebih tepat dipahami sebagai mekanisme sosial untuk menjaga harmoni, menghindari konflik, atau mempertahankan batasan privat dalam kehidupan keluarga. Penting untuk ditegaskan bahwa penelitian ini tidak secara khusus mengkaji nilai budaya atau etnis tertentu, termasuk budaya Sunda, karena aspek tersebut tidak muncul secara eksplisit dalam narasi informan. Oleh karena itu, analisis dalam bagian ini difokuskan pada relasi kuasa gender yang teridentifikasi dalam praktik pendampingan JaRI, tanpa mengekstrapolasikan temuan ke dalam kerangka budaya lokal yang tidak didukung oleh data lapangan.

Menurut pendekatan JaRI, ketika seorang remaja perempuan mengalami kekerasan dalam pacaran yang mengarah pada Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) seperti diminta untuk melakukan tindakan asusila yang kemudian direkam oleh kekasihnya. Hal ini sering kali disebut sebagai pembuktian cinta menurut norma yang berkembang, sebagaimana yang disepakati oleh Pengurus dan Relawan JaRI bahwa praktik yang kerap dimaknai sebagai pembuktian cinta dalam norma sosial yang berkembang, pada kenyataannya berpotensi melahirkan kekerasan berbasis gender yang dapat dialami oleh siapa pun, baik perempuan maupun laki-laki, yang ditandai oleh adanya pengalaman subjektif berupa rasa terganggu, penderitaan, serta kerugian yang dialami individu akibat relasi yang tidak setara. Pemahaman ini sejalan dengan konsep

yang dikemukakan oleh Susanto et al. (2024) bahwa interpretasi kekerasan berbasis gender memerlukan pendekatan yang holistik dan sensitif terhadap konteks budaya dan sosial di mana kekerasan tersebut terjadi.

Strategi Sosialisasi Yayasan JaRI dalam Menghadapi Tantangan Kultural dan Struktural

Bagian ini membahas bagaimana Yayasan Jaringan Relawan Independen (JaRI) merumuskan dan menjalankan strategi sosialisasi kekerasan berbasis gender (KBG) di tengah tantangan kultural, struktural, dan keterbatasan sumber daya. Temuan lapangan menunjukkan bahwa strategi JaRI tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi, tetapi juga pada pembentukan makna, negosiasi nilai, serta transformasi kesadaran kolektif masyarakat.

Menghadapi Tantangan Struktural dan Resistensi Institusional

JaRI menghadapi tantangan struktural dalam pelaksanaan sosialisasi, khususnya resistensi dari institusi pendidikan dan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai kekerasan berbasis gender. Temuan lapangan menunjukkan bahwa masih banyak individu yang tidak menyadari bahwa pengalaman yang mereka alami merupakan bentuk kekerasan, akibat rendahnya literasi gender, anggapan bahwa isu seksual bersifat tabu, serta kekhawatiran bahwa pembahasan KBG bertentangan dengan nilai budaya dan agama (Siregar et al., 2023).

Kondisi ini terlihat dalam praktik konsultasi JaRI, di mana relawan psikolog harus kembali menjelaskan definisi dasar kekerasan kepada korban agar mereka menyadari posisi mereka sebagai penyintas. Salah satu relawan psikolog JaRI mengungkapkan bahwa terdapat korban yang baru menyadari pengalaman kekerasan seksual yang dialaminya sejak usia dini setelah mengikuti konsultasi, meskipun sebelumnya ke-

kekerasan tersebut telah berlangsung berulang kali. Fenomena ini menunjukkan bahwa penyadaran korban merupakan proses yang tidak instan dan memerlukan pendekatan edukatif yang berkelanjutan.

Tantangan struktural juga muncul dari resistensi institusi pendidikan terhadap materi sosialisasi yang dibawa oleh JaRI. Pada kegiatan sosialisasi secara publik yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam beberapa kunjungan ke empat SD di Kota Bandung, ada salah satu SD Islam yang menolak untuk dikunjungi kembali. Meskipun orang tua siswa di SD tersebut sangat mendukung dan membutuhkan sosialisasi untuk membantu anak-anak memahami cara melindungi diri dari kekerasan, mengenali batasan tubuh, serta menumbuhkan kesadaran tentang rasa aman sejak dini selain diajarkan di rumah oleh orang tua. JaRI beranggapan bahwa penolakan tersebut terjadi karena lembaga pendidikan yang bersangkutan memiliki dasar keagamaan, sehingga diperlukan pendekatan dan penyampaian materi yang lebih disesuaikan dengan nilai serta metode khusus oleh tenaga pendidiknya. Kondisi ini mencerminkan apa yang diungkapkan oleh Castañeda (2025) dalam analisisnya terhadap teori Tilly tentang *contentious politics*, di mana gerakan sosial sering kali menghadapi resistensi dari struktur kekuasaan yang mapan. Menurut perspektif gerakan sosial baru, resistensi ini bukan hanya bersifat material tetapi juga kultural, di mana nilai-nilai patriarki yang tertanam dalam institusi pendidikan menjadi hambatan sistematis.

Adaptasi Materi dan Metode Sosialisasi Berbasis Segmentasi Sasaran

Yayasan JaRI menempatkan perempuan dan anak sebagai sasaran utama dalam kegiatan pendampingan dan sosialisasi kekerasan berbasis gender. Pemilihan sasaran ini bukan semata-mata didasarkan pada tingginya jumlah korban dari kelompok tersebut, tetapi merupakan strategi sadar untuk menjangkau kelompok yang paling rentan ter-

hadap normalisasi kekerasan dalam relasi sehari-hari. Dalam praktiknya, JaRI tetap membuka akses layanan bagi laki-laki dan kelompok gender lainnya, tetapi memprioritaskan perempuan dan anak sebagai fokus utama intervensi.

JaRI mengembangkan strategi sosialisasi dengan menyesuaikan materi dan metode berdasarkan karakteristik kelompok sasaran. Strategi ini diwujudkan melalui pembagian program ke dalam tiga kerangka utama, yaitu Anak Aman, Remaja Sehat, dan Perempuan Berdaya. Segmentasi ini didasarkan pada usia, tingkat kerentanan, serta konteks relasi sosial yang dihadapi masing-masing kelompok.



Gambar 1. Kegiatan pada program Anak Aman (Sumber: dokumentasi Yayasan JaRI melalui laman instagram Yayasan JaRI)

Program "Anak Aman" dilakukan melalui pendekatan aktivitas bermain yang menyenangkan dan visualisasi organ tubuh secara sederhana, agar anak-anak dapat mengenali batasan tubuh pribadi mereka dengan cara yang aman dan tidak menakutkan. Pendiri Yayasan JaRI menjelaskan proses ini.

"anak-anak itu diajak main sama kita mengenal tubuh dan organ reproduksi yang membedakan perempuan dan laki-laki, waktu diajarkan organ tubuh mereka bisa dan mau menunjuk atau menyebutkan, pas bagian penis dan vagina mereka malu-malu dan takut gitu kan,

diajarin dan akhirnya mereka bisa dan mau,". – (Wawancara dengan Pendiri Yayasan JaRI, 2025)

Pendekatan ini menunjukkan kepekaan sosial JaRI dalam mengadaptasi materi edukatif sesuai dengan tahap perkembangan psikologis anak.



Gambar 2. Kegiatan webinar program Remaja Sehat, sosialisasi mengenai toxic relationship. Sumber: dokumentasi Yayasan JaRI melalui youtube Yayasan JaRI.

Pada kategori "Remaja Sehat", materi mulai bergeser ke isu-isu yang lebih kompleks seperti *toxic relationship*, *consent*, tekanan sosial, serta dinamika dalam hubungan pacaran yang kerap berujung pada kekerasan. Sementara itu, pada program "Perempuan Berdaya", pendekatan lebih diarahkan pada penguatan kapasitas perempuan dewasa dalam memahami hak-haknya, mengenali bentuk kekerasan domestik dan ekonomi, serta membangun kemandirian dalam menghadapi tekanan struktural dari lingkungan sosial. Dalam kerangka gerakan sosial baru, yang dihadapi JaRI mencerminkan kompleksitas pembentukan identitas kolektif dan konstruksi sosial yang terus berkembang. Hal ini menjelaskan suatu proses pembentukan makna yang dijelaskan ulang dalam kajian-kajian terbaru tentang gerakan dan media (Grinspun, 2022). Temuan ini sejalan dengan penelitian Ramli et al. (2025) yang menunjukkan bahwa edukasi gender yang efektif memerlukan pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik demografis dan psikologis target partisipan.



Gambar 3. Kegiatan sosialisasi secara publik di hari ulang tahun Yayasan JaRI. Sumber: dokumentasi pribadi.

Sosialisasi dilakukan melalui berbagai jalur, mulai dari kunjungan langsung ke sekolah, pesantren, gereja, kelompok PKK, hingga forum-forum komunitas lokal. Seiring berjalannya perkembangan zaman, JaRI mulai beradaptasi dengan media sosial, meskipun pada media sebelumnya, JaRI menggunakan brosur sebagai alat sosialisasi yang disebar ke masyarakat berisikan informasi mengenai pengetahuan tubuh dan kampanye-kampanye lainnya. Sejak tahun 2017, JaRI telah mengembangkan konten digital yang konsisten, dengan target minimal satu unggahan edukatif setiap minggu yang berisi informasi mendasar tentang isu kekerasan, kesetaraan gender, atau penguatan kapasitas individu. Transformasi ini mencerminkan adaptasi gerakan sosial terhadap perubahan teknologi dan pola komunikasi masyarakat, sebagaimana dikonseptualisasikan dalam teori *connective action* oleh Bennett dan Segerberg (2012 dalam Kristianto et al., 2021).

Menghadapi Resistensi Budaya Patriarki melalui Pendekatan Reflektif dan Berulang

Resistensi terhadap sosialisasi KBG yang dihadapi JaRI tidak dapat dipahami secara tunggal sebagai ekspresi patriarki semata. Temuan lapangan menunjukkan bahwa sebagian resistensi berkaitan dengan relasi kuasa gender yang timpang dan normalisasi kekerasan dalam relasi domestik. Namun, terdapat pula bentuk resistensi yang berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk menjaga harmoni, menghindari konflik,

atau mempertahankan batasan privat dalam keluarga.

JaRI menghadapi kondisi ini dengan pendekatan reflektif dan berulang, di mana proses penyadaran tidak hanya dilakukan sekali, tetapi melalui interaksi yang konsisten. Meskipun korban telah mengikuti konsultasi dan memahami pesan yang disampaikan, dalam beberapa kasus mereka kembali terjerat dalam situasi kekerasan akibat faktor emosional, tekanan lingkungan, atau keterbatasan dukungan sosial. Pada praktiknya, JaRI menerima kedatangan yang berulang dari para penyintas jika dirasa dibutuhkan konsultasi yang berlanjut. Hal ini sejalan dengan temuan Andayani et al. (2022) yang menyatakan bahwa perubahan pola pikir terkait kekerasan membutuhkan proses yang berulang dan berkelanjutan.

Kasus pengucilan terhadap pelapor kekerasan seksual oleh komunitasnya sendiri, seperti yang terjadi pada pelapor kasus pencabulan oleh tokoh agama di salah satu wilayah Kota Bandung, menunjukkan bagaimana relasi kuasa dan status sosial memengaruhi keberanian untuk melapor. Kondisi ini menggambarkan dilema identitas politik dalam gerakan sosial, di mana korban dan pelapor justru mengalami stigmatisasi Prihanto dan Widaningrum (2024). Dalam kerangka gerakan sosial baru, resistensi semacam ini menegaskan pentingnya transformasi kultural yang lebih mendalam sebagai bagian dari perubahan sosial yang berkelanjutan (Qur'ana & Ulya, 2023).

Keberlanjutan Gerakan melalui Penggalangan Dana Berbasis Budaya

Sebagai lembaga swadaya masyarakat, JaRI menghadapi tantangan internal berupa keterbatasan sumber daya finansial. Untuk mengatasi hal ini, JaRI mengembangkan strategi penggalangan dana yang memanfaatkan kesenian lokal, seperti pagelaran tari legong yang mengangkat tema budaya India dan Bali. Kegiatan ini difasilitasi oleh

salah satu pendiri JaRI yang merupakan maestro tari legong, dan seluruh hasil penggalangan dana dialokasikan untuk mendukung kegiatan organisasi.

Strategi ini tidak hanya berfungsi sebagai upaya keberlanjutan pendanaan, tetapi juga menjadi medium sosialisasi dan simbol kreativitas gerakan sosial. Kegiatan seni tersebut memperlihatkan bagaimana unsur budaya dapat dimanfaatkan sebagai sarana pemberdayaan dan transformasi sosial. Temuan ini sejalan dengan konsep yang dikemukakan oleh Malherbe (2023) mengenai peran hegemoni kultural dan konstruksi ruang publik dalam pendekatan *radical democracy*, di mana praktik budaya dan simbolik berkontribusi dalam membangun dukungan publik.

Membuka Ruang Refleksi Kolektif untuk Menentang Normalisasi Kekerasan



Gambar 4. Kegiatan launching buku ke-3: *Merdeka dari Kekerasan*. Sumber: dokumentasi pribadi dan Instagram Yayasan JaRI.

JaRI tidak hanya berfokus pada pendampingan korban, tetapi juga membuka ruang refleksi bagi masyarakat untuk mempertanyakan budaya patriarki dan norma sosial yang kerap menyalahkan korban. Strategi ini diwujudkan melalui pengembangan karya literasi, seperti penerbitan seri buku

Merdeka dari Kekerasan yang memuat kisah nyata penyintas, refleksi pendamping, dan panduan praktis mengenali tanda-tanda kekerasan.

Yayasan JaRI memahami bahwa menanamkan gagasan pencegahan melalui karya literasi tidak kalah penting. Tiga buku bertajuk *Merdeka dari Kekerasan* menjadi media penting dalam sosialisasi, berisi kisah nyata penyintas, refleksi para pendamping, serta panduan praktis mengenali tanda-tanda kekerasan. Dalam kegiatan *launching* buku ketiga yang peneliti ikuti, relawan JaRI membacakan potongan kisah dari buku tersebut. Beberapa peserta yang hadir, seolah menemukan pengalaman mereka sendiri dalam cerita yang dibacakan. Seorang peserta bahkan berkomentar lirih, “*Ternyata saya juga mengalami hal itu, tapi saya tidak tahu kalau itu termasuk kekerasan.*” Momen ini menunjukkan bahwa literatur tidak hanya menjadi teks, tetapi juga cermin yang memvalidasi pengalaman korban.



Gambar 5. Buku pertama *Merdeka dari Kekerasan*. Sumber: website Yayasan JaRI.

Kehadiran buku *Merdeka dari Kekerasan* juga membuka ruang dialog interaktif, baik dalam forum tatap muka maupun diskusi daring. Narasi-narasi dalam buku kemudian diadaptasi oleh JaRI menjadi konten digital singkat yang dibagikan melalui media sosial sehingga memperluas jangkauan pesan ke generasi muda. Temuan ini sejalan dengan Saragih et al., (2024) yang menekankan pentingnya literasi digital sebagai instrumen pencegahan KBG. Namun, JaRI mem-

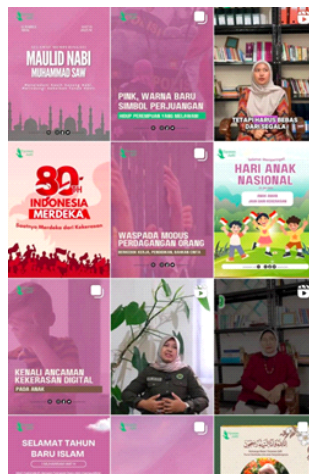
perluas makna literasi dengan menautkan bacaan cetak dan ruang digital sehingga sosialisasi berlangsung dengan berlapis dan kontekstual. Melalui cara ini, pengetahuan tidak berhenti pada teks, tetapi bergerak melalui interaksi, diskusi, dan pengalaman kolektif. Strategi ini memperlihatkan bahwa literasi berbasis komunitas, ketika dipadukan dengan media digital, mampu menjadi senjata kultural dalam menggeser normalisasi kekerasan menuju budaya yang lebih adil gender.



Gambar 6. Kegiatan pelatihan relawan. Sumber: dokumentasi pribadi.

JaRI juga mengembangkan pelatihan kader atau relawan sebagai bagian dari strategi sosialisasi jangka panjang. Pelatihan ini tidak hanya ditujukan untuk merekrut anggota baru, tetapi juga sebagai proses kaderisasi dan penyebaran pengetahuan berbasis komunitas. Dalam pelatihan, peserta menghadiri 5 kali pertemuan dalam kurang lebih 2 bulan dan diberikan pemahaman mendalam tentang gender, relasi kuasa, bentuk-bentuk kekerasan, serta metode komunikasi dan intervensi berbasis empati. Beberapa peserta pelatihan bahkan merupakan penyintas yang telah pulih dan kini berperan sebagai fasilitator dalam kegiatan pendidikan publik atau pelatihan keterampilan. Praktik ini memperlihatkan bahwa JaRI tidak sekadar menolong korban, tetapi turut membangun ruang pemberdayaan berkelanjutan yang mencerminkan prinsip transformasi identitas dalam gerakan sosial baru. Pengurus JaRI menjelaskan “*itu bagian dari sosialisasi untuk mengajak-menga-*

jak orang jadi relawan, gitu ya, aware, tapi sebenarnya itu bagian dari kaderisasi sih, kaderisasinya JaRI, kami perlu orang-orang baru entah kan nanti dia jadi agent-nya di JARI maupun dia agent di tempat lain." Strategi kaderisasi ini sejalan dengan konsep yang dikemukakan oleh Nofrima & Qodir (2021) tentang pentingnya pembangunan kapasitas lokal dalam gerakan sosial untuk menciptakan dampak yang berkelanjutan dan meluas. Pendekatan ini juga mencerminkan karakteristik gerakan sosial baru yang menekankan pada pembentukan jaringan (*network society*) dan desentralisasi kekuatan sebagai alternatif terhadap struktur organisasi yang hierarkis (Prasisko, 2016).



Gambar 7. Tampilan laman informasi pada instagram Yayasan JaRI. Sumber: dokumentasi pribadi.

Tidak dapat dipungkiri, JaRI juga perlu untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman untuk memudahkan proses penyaluran informasi, salah satunya melalui konten digital. Konten digital dikemas dengan bahasa yang mudah dipahami, desain yang ramah pembaca, serta kerap disesuaikan dengan momen sosial atau kasus kekerasan yang sedang ramai diperbincangkan publik. Strategi ini menjadi upaya JaRI untuk merawat kesadaran masyarakat secara berkelanjutan, tanpa harus selalu bergantung pada intervensi tatap muka. Relawan JaRI menjelaskan bahwa,

"sekarang tuh seminggu sekali ya. Jadi selama 72 minggu itu, setahun akan ada 72 konten. Itu tuh di luar yang umum gitu, kayak selamat lebaran, selamat hari anak, selamat apa. Itu mah ada gitu ya, tapi konten yang kontennya kita tiap minggu ada. Substantif soal pencegahan kekerasan ada,".

Konsistensi ini menunjukkan komitmen jangka panjang JaRI dalam membangun kesadaran publik melalui edukasi berkelanjutan.

Representasi Yayasan JaRI sebagai Gerakan Sosial

Berdirinya Yayasan JaRI tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-politik Indonesia pada era Reformasi 1998. Lembaga ini muncul sebagai respon kolektif terhadap kekerasan dan aksi represi yang dialami mahasiswa di Kota Bandung saat itu. Berawal dari kerja-kerja pertolongan medis, psikologis, dan hukum bagi para demonstran, JaRI perlahan membangun kesadaran bahwa tindak kekerasan yang terjadi bukan sekadar peristiwa tunggal, melainkan bagian dari struktur sosial yang timpang dan menormalkan pembungkaman suara-suara kritis. Kesadaran inilah yang menjadi fondasi JaRI sebagai gerakan sosial, sejalan dengan teori gerakan sosial baru yang dikemukakan oleh Tilly dan Wood (2015), yang menekankan pentingnya kesadaran kolektif sebagai pemicu munculnya gerakan. Pendiri JaRI mengatakan,

"waktu reformasi ada sekelompok orang yang yaa kami membentuk sebuah gerakan sosial pada awalnya berisi dokter, psikolog, sosiolog, macem-macem lah, ada juga ibu rumah tangga yang bantu proses reformasi di pihak mahasiswa, karena waktu itu mahasiswa dikejar-kejar tentara, dapet tindakan represif dari tentara dikejar-kejar sampai ke kampus,".

Proses perubahan dari gerakan bersifat darurat menjadi organisasi yang bersifat permanen ini mencerminkan transformasi yang alami dari perilaku kolektif menjadi gerakan sosial yang terlembaga. Gerak langkah JaRI memperlihatkan ciri khas gerakan sosial baru, yakni berfokus pada perubahan relasi kuasa, transformasi kesadaran, dan pembentukan identitas kolektif berbasis nilai solidaritas yang melampaui batasan kelas tradisional.

JaRI tidak hanya menolong korban, tetapi juga membuka ruang refleksi bagi masyarakat untuk mempertanyakan budaya patriarki dan norma sosial yang kerap menyalahkan korban. Dalam program-program seperti Anak Aman, Remaja Sehat, dan Perempuan Berdaya, JaRI secara konsisten memadukan edukasi publik dengan pemberdayaan korban agar mampu memahami hak-haknya, mengenali bentuk-bentuk kekerasan, dan menemukan kembali agensi mereka. Pendekatan ini mencerminkan fokus gerakan sosial baru terhadap perubahan kultural dan pembongkaran dominasi simbolik, bukan sekadar perubahan kebijakan formal (Della & Diani, 2020). Pengurus JaRI menegaskan transformasi ini,

"Yang saya lihat dari JaRI ketika melakukan intervensi itu adalah memberikan kembali, mengembalikan kuasa kontrol seseorang itu kepada dirinya, gitu. Itu yang menurut saya itu luar biasa ya, Jari ya. Karena korban kekerasan itu kan terampas gitu ya, terampas harga dirinya kehilangan jati diri."

Proses pemulihan ini tidak hanya bersifat individual tetapi juga kolektif, di mana penyintas menjadi agen perubahan bagi korban lainnya. Kegiatan kampanye publik dilakukan JaRI, baik melalui kunjungan langsung ke sekolah, pesantren, kelompok PKK, maupun melalui konten edukasi digital sejak 2017. Kehadiran JaRI di ruang-ruang komunitas lokal mencerminkan legi-

timasi moral melalui kompetensi pendampingan hukum dan psikologis, pembangunan jaringan relawan dan kader menggambarkan sebuah persatuan gerakan, jumlah partisipan yang dicapai melalui edukasi langsung dan media sosial menegaskan partisipasi publik secara tidak langsung, sementara konsistensi mereka untuk tetap bersuara meskipun menghadapi tekanan menjadi bukti nyata komitmen JaRI sebagai sebuah gerakan sosial.

Proses kaderisasi dan pelatihan relawan yang dilakukan JaRI juga memperlihatkan bahwa organisasi ini bukan hanya lembaga layanan, tetapi juga ruang belajar bersama yang menumbuhkan kesadaran kritis dan solidaritas lintas identitas. Ini sejalan dengan gagasan gerakan sosial baru tentang pentingnya transformasi identitas, di mana korban tidak lagi hanya diposisikan sebagai objek pertolongan, tetapi menjadi subjek yang dapat menjadi agen perubahan di komunitasnya sendiri. Salah satu relawan JaRI yang merupakan seorang penyintas kekerasan menjelaskan, *"Saya dulu merupakan penyintas KDRT yang berjuang untuk melawan segala hal yang saya rasakan. Dan setelah saya sadar, saya mendapatkan ilmunya dari JaRI, sekarang saya ingin sekali bikin sosialisasi tentang persiapan pra-nikah."*

Transformasi identitas dari korban menjadi advokat ini menunjukkan keberhasilan JaRI dalam menciptakan pemberdayaan yang berkelanjutan. Seluruh kerja JaRI mulai dari pendampingan korban, pendidikan publik, kampanye digital, hingga pelatihan tidak hanya memperlihatkan kesadaran kritis terhadap struktur sosial yang melanggengkan kekerasan, tetapi juga menghadirkan gerakan sosial yang tumbuh dari bawah, berbasis pengalaman nyata, dan dijalankan dengan keberanian untuk peduli. Meskipun JaRI tidak pernah secara formal menyebut diri sebagai gerakan sosial, kiprah dan prinsip kerjanya memperlihatkan semua unsur penting yang dirumuskan oleh teori gerakan sosial baru: lahir dari situasi

krisis, didorong oleh kesadaran kolektif, berupaya mengubah struktur dan budaya, serta membangun solidaritas lintas sektor untuk memperluas dampak perubahan sosial.

Karakteristik gerakan sosial baru yang terlihat pada JaRI juga mencakup fokus pada *identity politics* dan *cultural transformation* sebagaimana dikemukakan oleh Widodo (2016) dalam studinya tentang gerakan kesetaraan gender di Indonesia. JaRI berhasil menciptakan ruang bagi para penyintas untuk kembali menunjukkan jati diri dan mengambil kendali atas hidup mereka setelah mengalami kekerasan. Pengurus JaRI menggambarkan proses pemulihan korban sebagai pengalaman transformatif. Ia menuturkan, *“banyak korban yang bilang bahwa ketika JaRI itu tempat dia lahir kembali. Itu yang menurut aku luar biasa ya, JaRI.”* Konsep 'lahir kembali' ini menunjukkan transformasi identitas yang fundamental, bukan hanya penyembuhan trauma tetapi juga rekonstruksi nilai diri dan menjadi berdaya. Dalam konteks teoritis, hal ini sejalan dengan konsep yang dikemukakan oleh Sukmana (2016) tentang gerakan sosial sebagai proses konstruksi sosial atas realitas yang melibatkan perubahan makna dan nilai dalam masyarakat. JaRI bukan hanya lembaga layanan korban, tetapi juga representasi nyata gerakan sosial baru di Indonesia: gerakan yang memadukan advokasi, edukasi, pemberdayaan, dan refleksi kritis terhadap relasi kuasa yang timpang. Kerja-kerja JaRI menjadi bukti bahwa perubahan sosial bukan hanya lahir dari kebijakan formal, tetapi juga dari keberanian untuk menolak narasi dominan dan merawat kesadaran kritis di tingkat akar rumput. Transformasi ini mencerminkan apa yang oleh Fadli (2017) disebut sebagai agensi politik perempuan dalam menciptakan ruang-ruang alternatif untuk perjuangan keadilan dan kesetaraan gender di Indonesia pasca-Reformasi.

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender merupakan produk dari struktur sosial dan budaya patriarki yang menempatkan perempuan serta kelompok rentan pada posisi subordinat. Banyak bentuk kekerasan tidak dikenali karena telah dinormalisasi dalam relasi sehari-hari. Yayasan Jaringan Relawan Independen (JaRI) sebagai gerakan sosial berbasis komunitas memainkan peran penting dalam membongkar konstruksi kekuasaan tersebut melalui strategi sosialisasi yang terstruktur, partisipatif, dan berbasis layanan multidisipliner (psikologis, medis, dan hukum). Melalui pendekatan etnografi, penelitian ini menemukan bahwa strategi JaRI tidak hanya berfokus pada edukasi publik, tetapi juga pemberdayaan korban dan pelibatan komunitas lokal sebagai bagian dari upaya transformasi sosial.

Meskipun strategi ini efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, JaRI tetap menghadapi tantangan berupa resistensi budaya, stigma sosial terhadap korban, serta keterbatasan sumber daya. Temuan ini menegaskan bahwa upaya sosialisasi tidak cukup dilakukan secara teknokratis, melainkan harus berbasis pada pendekatan kultural dan dialogis yang peka terhadap konteks lokal. Secara akademis, penelitian ini memperkaya kajian antropologi dengan memperlihatkan bagaimana gerakan sosial berbasis komunitas dapat mendekonstruksi patriarki dan membangun identitas kolektif menuju keadilan gender. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan rujukan bagi NGO, lembaga pendidikan, dan pemerintah daerah dalam merancang strategi sosialisasi KBG yang lebih responsif terhadap kondisi budaya dan sosial masyarakat.

Ucapan Terima Kasih

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, kasih, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel yang berjudul *“Sosialisasi Kekerasan Berbasis Gender: Studi Etnografi pada Yayasan Jaringan*

an Relawan Independen” dengan baik.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yayasan JaRI yang telah bersedia menjadi objek penelitian dalam artikel ini. Terima kasih atas kesediaan memberikan akses data, kesempatan observasi, serta ruang diskusi yang sangat membantu penulis dalam memahami lebih dalam tentang gerakan sosial dan kerja-kerja pendampingan korban kekerasan berbasis gender. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh informan yang terdiri dari pendiri, pengurus, hingga relawan yang dengan penuh keterbukaan telah berbagi pengalaman dan pemikiran sehingga memperkaya analisis dalam penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Akbar, A. A., Ashar, S. M., & Simonson, J. (2021). Movement Law. *Stan. L. Rev.*, 73, 821.
- Andayani, R. P., Afnuhazi, R., Dafris, S., Huda, P. R., Ningsih, Y. H. D., Defrima Oka Surya6, G., & Sapardi, V. S. (2022). Implementasi Personal Safety Skill untuk Pencegah Kekerasan Seksual Pada Anak Sekolah Dasar. *Jurnal Abdi Mercusuar*, 2(2), 51–58.
- Arief, A. (2018). Fenomena Kekerasan Berbasis Gender & Upaya Penanggulangannya. *Petitum*, 6.
- Assyakurrohim, D., Ikhrum, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2023). Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3.
- Astuti, D. (2023). Relasi Kuasa dalam Kekerasan Berbasis Gender. *Jurnal Ilmiah Padma Sri Kreshna*, 5.
- Atang, A. (2018). *Gerakan Sosial dan Kebudayaan: Teori dan Strategi Perlawanan Masyarakat Adat Atas Serbuan Investasi Tambang*. Intrans Publishing.
- Atikah Rahmi, Umami Salamah, N. K. (2024). Edukasi Hukum Berkeadilan Gender Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Bagi Pengurus ‘Aisyiyah Di Medan. *Abdi Sabha (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat)*, 246–256.
- Bennett, W. L., & Segerberg, A. (2012). The Logic of Connective Action: Digital Media and the Personalization of Contentious Politics. *Information, Communication & Society*, 15(5), 739–768.
- Bintari, A., & Djustiana, N. (2015). *uPaYa Penanganan kOrBan dan PenCegaHan tindak Perdagangan Orang (HUMAN TRAFFICKING) di kaBuPaten indraMa-Yu PrOVinsi JaWa Barat* 66. 1(1). www.bkkbn.go.id
- Cammaerts, B. (2021). The New-New Social Movements: Are Social Media Changing The Ontology Of Social Movements?*. *Mobilization*, 26(3), 343–358.
- Castañeda, E. (2025). Charles Tilly’s Theories About the Origins of European Nation-States, Social Movements, Contentious Politics, and Democracy. *American Behavioral Scientist*, 69(7), 921–943.
- Clara, C., & Nugroho, F. (n.d.). *Program Men Care Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga : (Studi Deskriptif Pada Yayasan Pulih, Jakarta)*. <https://doi.org/10.7454/jurnalkessos.v17i2.1098>
- Collins, P. H. (2019). *Intersectionality as Critical Social Theory*. Duke University Press.
- Conti, C., Hall, A., Moallemi, E. A., Laila, A., Bene, C., Fanzo, J., Gibson, M. F., Gordon, L., Hicks, C., Kok, K., Rao, N., Laxminarayan, R., & Mason-D’Croz, D. (2025). Top-down vs bottom-up processes: A systematic review clarifying roles and patterns of interactions in food system transformation. *Global Food Security*, 44(1), 1–16.
- Damanik, A. (2022). Perempuan dan Gerakan Sosial Politik. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 6.
- Della, P. D., & Diani, M. (2020). *Social Movements: An Introduction* (3rd ed.). Wiley.
- Diana Dushkova, O. I. (2024). Empowering Communities to Act for a Change : A Review of the Community Empowerment Programs towards Sustainability and Resilience. *Sustainability*, 16(8700). <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/su16198700>
- Eleanora, F. N., & Supriyanto, E. (2020). Violence against Women and Patriarchal Culture in Indonesia. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7(9), 44. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v7i9.1912>
- Ernawati, E., Wahab, G. A., & Mahmuddin, H.

- (2020). Literatur Review: Pengaruh Kekerasan Komunikasi Verbal (Verbal Abuse) Terhadap Pembentukan Karakter Anak Usia 3-6 Tahun. *JIMPK: Jurnal Ilmiah Mahasiswa & Penelitian Keperawatan*, 1(3), 271–278.
- Fadli, Y. (2017). Islam, Perempuan dan Politik: Argumentasi Keterlibatan Perempuan dalam Politik di Indonesia Pasca Reformasi. *Journal of Government and Civil Society*, 1(1), 41–63.
- Foucault, Michel., & Gordon, Colin. (1980). *Power/knowledge: Selected Interviews and Other Writings*. Pantheon Books.
- Fulu, Emma. (2015). *Why do some men use violence against women and how can we prevent it? : quantative findings from the United Nations multi-country study of men and violence in Asia and the Pacific*. UNDP [etc].
- Ghina, R. (2022). *Strategi Sumberdaya Gerakan Sosial Berbasis Gender dalam Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender di Indonesia*. (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Gilang Pratama, A., Suryaningsi, S., & Wingkolatin, W. (n.d.). Realizing Social Justice: East Kalimantan's Gender Profile 2023 in the Perspective of Human Rights and Citizenship conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC-BY-SA) license. *HUMANISMA: Journal of Gender Studies*, 8(1). <https://doi.org/10.30983/humanisme.v4i2.9717>
- Grijns, M., Horii, H., Irianto, S., Saptandari, P., Marhamah, U. S., Karolus, M. L., & van Bemmelen, S. T. (2018). *Menikah Muda di Indonesia: Suara, Hukum, dan Praktik*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Grinspun, D. (2022). *Exploring social movement concepts and actions in a changing media environment*. Social Movement Studies / review.
- Halla, N., & Mare, F. J. (2025). Pentingnya Sosialisasi Pemahaman Gender Sejak Dini di Lingkungan Masyarakat Stasi Salib Suci Lamaojan, Paroki Riangpuho. *Jurnal Kelitbang*, 13.
- Hamdy, K., & Hudri, M. (n.d.). *Open Journal Systems GENDER BASED VIOLENCE: THE RELATIONSHIP OF LAW AND PATRIARCHY IN INDONESIA*. <https://doi.org/10.15408/empati>
- Harris, A., Rahman, A., & Ahmad, W. I. W. (2019). Mengenal Gerakan Sosial dalam Perspektif Ilmu Sosial. *Hasanuddin Journal of Sociology*, 1(1).
- Hesti Wulandari, Askrening, Khalidatul Khair Anwar, Muliaty Dolofu, N. (2024). Pemberdayaan dan Penguatan Perempuan dalam Pemenuhan Hak-Hak Reproduksi di Desa Sawa, Kabupaten Konawe Utara. *Segantang Lada: Jurnal Pengabdian Kesehatan*, 2(1), 1–11.
- Hidayat, R., Apriani, I., Putri, L., Muarif, I., Dola, M. P., & Yuanda, M. (2025). Pengembangan Media Pembelajaran PPT Interaktif untuk Meningkatkan Pemahaman Siswa dalam Mata Pelajaran PKn di Sekolah Dasar. *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*, 3(2), 365–374.
- KOMNAS PEREMPUAN. (2023). *CATAHU 2023: PELUANG PENGUATAN SISTEM PENYIKAPAN DI TENGAH PENINGKATAN KOMPLEKSITAS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN*. <https://www.komnasperempuan.go.id>
- Kreft, A. K. (2023). “This Patriarchal, Machista And and Unequal Culture Of of Ours”: Obstacles To to Confronting Conflict-Related Sexual Violence. *Social Politics: International Studies in Gender, State & Society*, 30(2), 654–677.
- Kristen Meagher, Mouna Khaity, Sali Hafez, Mariana Rodo, N. E. A. and P. P. (2023). Strengthening Health Systems and Peacebuilding Through Women's Leadership : a Qualitative Study. *Globalization and Health*, 19(21), 1–18. <https://doi.org/10.1186/s12992-023-00920-1>
- Krüger, S. (2008). Ethnography in the Performing Arts: A Student Guide. In *Student Guide*.
- Laclau, E., & Mouffe, C. (2014). *Hegemony and Socialist Strategy: Towards A Radical Democratic Politics* (Vol. 8). Verso Books.
- Litbang, P. B., & Semarang, A. (n.d.). *MEMAHAMI ETNOGRAFI ALA SPRADLEY Ethnographic Understanding by Spradley*.
- Lubis, A. F., Hasibuan, K., & Andiani, P. (2023). Peran dan Tantangan Implementasi Hukum Internasional tentang Hak Asasi Manusia dalam Penanganan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(10), 964–972.
- Malherbe, N. (2023). Psychology and the question of Radical Democracy. *Theory and Psychology*, 33(6), 771–791.

- Melucci, A. (1996). *Challenging Codes: Collective Action in the Information Age*. Cambridge University Press.
- Mulla, S. (2026). Anthropology of Gender-Based Violence: Beyond the Binaries of Intervention. *Annual Review of Anthropology*. <https://doi.org/10.1146/annurev-anthro-041422>
- Munandar, S. A. (2025). Empowering Women and Advancing Peace : A Study of Wahid Foundation's Initiatives for Inclusive Social Transformation in Indonesia. *Annisa: Journal of Gender Studies*, 18(1), 73–88. <https://doi.org/10.35719/annisa.v18i1.312>
- Nadhifah, Z., & Kusumawati, I. R. (2024). Musyawarah: Sosialisasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual pada Perempuan Berujung Damai. *Musyawarah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 47–53.
- Nofrima, S., & Qodir, Z. (2021). Gerakan Sosial Baru Indonesia: Studi Gerakan Gejayan Memanggil 2019. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 16(1), 185.
- Noko Anjelina, Tara Mboru Susanti, Diki Saputra Matias, & Mas'ud Fadil. (2025). ADVOKASI HAM BERBASIS KOMUNITAS DAN AKTIVISME ONLINE : STUDI KASUS GERAKAN SOSIAL DALAM PENANGGULANGAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA KUPANG.
- Nurfadillah A. A. (n.d.). *Budaya Patriarki sebagai Faktor Struktural Ketimpangan Gender di Indonesia*.
- Oktarina, S., & Putra, H. P. (2021). Rohana Kuddus: Gender Dan Gerakan Sosial-Politik. *Journal of Feminism and Gender Studies*, 1(2), 59–74.
- Perangin-Angin, R., & Firoz, D. (2024). Tourism Impact of Social Media Influencers on Entrepreneurship During COVID-19. In *Tourism Entrepreneurship: Knowledge and Challenges for a Sustainable Future* (pp. 147–169). Springer Nature Switzerland.
- Prasetyo, F. A., & Wulandari, K. (2023). *Buku Ajar Metode Intervensi Pekerjaan Sosial dengan Kelompok*. Zifatama Jawa.
- Prasisko, Y. G. (2016). Gerakan Sosial Baru Indonesia: Reformasi 1998 dan Proses Demokratisasi Indonesia. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 3.
- Dwi Pratama, S. (2024). *Viktimisasi Struktural dan Kesehatan Mental Perempuan Korban Kekerasan dalam Relasi Pacaran*.
- Pratiwi, D., & Arrawindha, U. (2021). Tingkat Advokasi Aktivist Perempuan Lembaga Berbasis Komunitas Terhadap Penyintas Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Sosiologi Pendidikan Humanis (JSPH)*, 1(6), 216–232.
- Pratiwi, W. (2025). *Analisis Hukum Islam terhadap Hak-Hak Pekerja Perempuan dalam Struktur Sosial Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat (Studi pada Abdi Dalam Perempuan)*. Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia.
- Prihanto, B. A., & Widaningrum, A. (2024). Dinamika Perjuangan Kesetaraan Gender Masyarakat Urban (Memahami Gerakan Sosial International Women's Day di Kota Semarang). *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 23(1), 22–38.
- Qur'ana, F. A., & Ulya, N. A. (2023). Pengarusutamaan feminisme di Indonesia: Studi pemikiran Etin Anwar dan Siti Ruhaini Dzhayatin. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 18(2), 245–266.
- Ramli, U., Purwanti, N., Rais, L., Basri, L., & Hidayat, N. (2025). Mencegah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Melalui Edukasi Gender dan Ketahanan Keluarga di Distrik Sorong Kepulauan. *Jompa Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 104–113.
- Ratnasari, E., Sumartias, S., & Romli, R. (2020). Penggunaan Message Appeals dalam Strategi Pesan Kampanye Anti Kekerasan Berbasis Gender Online. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 18(3), 352–370.
- Rosramadhana, Sudirman, Iqbal, M., Sari, P., Siregar, R., & Rachmah, S. (2020). *Isu Gender dan Bullying Sebuah Pendekatan Sensitif Gender dalam Kajian Antropologi* (Vol 1). CV. AA. Rizky.
- Saragih, E. S., Panggabean, J. Z. Z., & Situmorang, S. (2025). Women's Class Reposition in the Batak Tarombo. *Proceedings of the 3rd International Conference on Christian and Inter-Religious Studies*, 932(1), 392.
- Saragih, I. D., Batubara, S. O., Sharma, S., Saragih, I., & Chou, F. H. (2024). A meta-analysis of mindfulness-based interventions for improving mental health and burden among caregivers of persons living with dementia. *Worldviews on Evidence-*

- Based Nursing*, 21(2), 183–193.
- Sari, S. G., Fauzan, A., Armiati, A., & Yerizon, Y. (2021). Pengembangan Media Pembelajaran Matematika Interaktif Berbasis Problem Based Learning di Kelas V SDN 22 Duku Kecamatan Koto XI Tarusan. *Jurnal Cendekia*, 5(2), 2123–2132.
- Savira Ratna Ananda, & Moh. Amin Tohari. (2023). Advokasi Sosial terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual di P2T-P2A Kota Tangerang Selatan. *Journal of Creative Student Research*, 1(6), 01–09. <https://doi.org/10.55606/jcsrpolitama.v1i6.2832>
- Spradley, J. P. (1979). *The ethnographic interview*. Harcourt Brace Jovanovich.
- Sitanggang, Y. H., Nainggolan, E. L. S. B., & Siregar, A. R. M. (2024). Teori Hukum Feminisme dan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan di Indonesia. *Judge: Jurnal Hukum*, 5(04), 10–18.
- Somma, N. M. (2023). Resource mobilization and political process theories in comparative perspective. In *The Oxford Handbook of Social Movements*.
- Sukmana, O. (2016). *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*. Intrans Publishing.
- Susanto, J., Utari, I. S., & Mursyid, A. M. (2024). Implikasi Teori Hukum Feminis terhadap Interpretasi dan Penerapan Hukum dalam Kasus-Kasus Kekerasan Berbasis Gender. *Hukum Dan Politik Dalam Berbagai Perspektif*, 3.
- Syarifuddin, S., Darhim, D., & Yulianti, K. (2023). Analisa Kemampuan Berpikir Aljabar Siswa Ditinjau dari Self-Efficacy dan Gender. *Didaktis: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Pengetahuan*, 23(3), 121–132.
- Tarrow, S. (2022). *Power in Movement*. Cambridge University Press.
- Tilly, C., & Wood, L. J. (2015). *Social Movements, 1768-2012*. Routledge.
- Touraine, A. (1980). The Voice and the Eye: on the Relationship Between Actors and Analysts. *Political Psychology*, 3–14.
- Triantono, Marizal, M., & Nisa, F. K. (2024). Penguatan Kapasitas Masyarakat dalam Pencegahan Perkawinan Usia Anak dan Kekerasan Berbasis Gender Model Kolaboratif-Pastisipatif. *E-DIMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 15.
- Uswatina, E. D., Madja, N. M. El, Zahrotun, N., Putra, Y. A., Ilham, N. A., Ningrum, M. S., Widiyastuti, V. N., Kurnia, N. A., Wardani, S. D. K., Ulviana, & Habibah, N. Al. (2021). *Power Perempuan dalam Mencegah Kekerasan Seksual*. Penerbit NEM.
- Wardani, R. (2024). Perkembangan Arah Non-Governmental Organization (NGO) serta Civil Society di Indonesia: Periode 2024–2025. *Jurnal Sosial Teknologi*, 4(9), 669–679.
- Waruwu, D. (2019). *Analisis Pelaksanaan Aksi Sosial Women's March Tahun 2018 Mengenai Kekerasan dan Diskriminasi Seksual pada Perempuan di Jakarta*. Doctoral dissertation, Universitas Mercu Buana Jakarta.
- Widodo, A. S. (2016). *Gerakan Aliansi Laki-Laki Baru dalam Perspektif Feminisme: Relevansinya terhadap Perjuangan Keadilan dan Kesetaraan Gender di Indonesia (Suatu Tinjauan Filsafat Sosial)*. Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada.
- Wijayanti, M. N. (2019). *Peran Institut Kapal Perempuan dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Manusia Berperspektif Keadilan Gender di Indonesia*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Wura, H. W., & Lobo, F. N. (2024). Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Kekerasan di Kabupaten Flores Timur. *Jurnal Multidisiplin Inovatif*, 8.
- You, Y., Rusmansara, E. H., Mansoben, J., & Poli, A. I. (2019). Relasi Gender Patriarki dan Dampaknya terhadap Perempuan Hubula Suku Dani, Kabupaten Jayawijaya, Papua. *Sosiohumaniora - Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1.
- Yulianingsih, Y., & Herawati, E. (2022). Tragedi dalam Harmoni: Budaya, Gender, dan Kekerasan pada Perempuan di Jawa Barat. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 24(1), 90–99. <https://doi.org/10.25077/jantro.v24.n1.p90-99.2022>
- Yuliansih, D. H., & Aini, R. (2023). Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender Melalui Media Banner di UIN KH Adurrahman Wahid Pekalongan. *KHIDMAH: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 88–98.
- Zhafarina, A. N., & Andity, A. W. (2022). Pemahaman Kekerasan Berbasis Gender terhadap Mahasiswa Sebagai Upaya Non-Penal dalam Penanggulangan Kekerasan Berbasis Gender di Lingkungan Kampus. *Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada*, 34(2), 497–520.